



Layanan Publik Tak Berbelit

● Pemkot Yogya Kembangkan Sistem Organisasi Online untuk Menyempurnakan Standar

YOGYA, TRIBUN - Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Kris Sarjono Sutedjo menjelaskan, saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta sedang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan demi terciptanya pelayanan publik yang maksimal. Pemkot akan lebih menerapkan sistem pelayanan publik yang cepat, sederhana dan tidak berbelit.

"Dari hasil evaluasi kami, sebetulnya tingkat pelayanan sudah bagus, tapi masyarakat terkadang masih memiliki *mindset* yang negatif, masyarakat kurang percaya pada pemerintah," terangnya dalam forum diskusi yang digelar Forum Komunikasi Peningkatan Aparatur Daerah Tingkat Kota Yogyakarta, yang digelar Rabu (17/12).

Diskusi yang digelar di Ruang Utama Balai Kota itu mengangkat tema "Perbaikan Pelayanan Melalui Perubahan *Mindset* dalam Penyelenggaraan Pelayanan". Saat ini, kata dia, Indonesia masih berada pada urutan bawah dalam standar pelayanan publik.

Oleh sebab itu, pihaknya berupaya memulai perubahan pelayanan dari tingkat Pemkot Yogyakarta. Adapun langkah yang ditempuh antara lain penyederhanaan persyaratan dan prosedur layanan, penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung layanan, penetapan dan aplikasi Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pel-

ayanan Publik (SPP) dan meraih ISO. ISO sendiri tidak hanya akan sekedar diraih, melainkan diterapkan optimal dalam bentuk pelayanan.

"Saya harap masyarakat dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan saat mengakses layanan. Karena bisa dimungkinkan, pegawai di lingkungan Pemkot sudah memberikan pelayanan sesuai prosedur yang ada, namun masyarakat yang justru tidak memenuhi aturan. Padahal, dalam penerapan pelayanan, kedua pihak harus seiring sejalan," terangnya.

Demi memaksimalkan reformasi birokrasi, kinerja dan mendukung pelayanan kepada masyarakat, Pemkot juga akan mengembangkan sistem keorganisasian pada awal 2015 awal, dalam bentuk program *e-organisasi*. Sistem *online* itu diperuntukkan bagi kegiatan pengorganisasian di institusi Pemkot.

"Harapannya dengan *e-organisasi*, bisa mempermudah, mempercepat dan menyempurnakan standar pelayanan," jelasnya.

Jangan Sinis
 Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga meminta tak menanggapi sinis soal maraknya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Warga masyarakat diimbau memiliki pola pikir positif terhadap keberadaan industri hotel.

Hal itu disampaikan oleh

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Imam Priyono. Sesuai tema yang diangkat, Imam menekankan pembangunan hotel yang ada di Kota Yogyakarta, bisa memberikan dampak positif terhadap warga Kota Gudeg.

Ia mencontohkan, pebisnis hotel tentu saja akan membuka lapangan kerja bagi warga Kota Yogyakarta. Hal itu tentu saja, akan berdampak pada kesejahteraan warga yang akan semakin meningkat.

"Jadi jangan selalu beranggapan, banyak hotel maka Pemkot banyak terima gratifikasi, itu tidak benar," ujar Imam lagi.

Seharusnya, lanjut Imam, yang perlu dilakukan sekarang, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta harus lebih mempersiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri hotel. Misalnya dengan memberikan pelatihan bagi calon tenaga kerja. Hal itu penting agar siap menghadapi persaingan kerja.

"Itu *mindset* masyarakat yang harus bisa diubah, tapi memang sulit memandang dari sudut lain," ucapnya.

Termasuk soal pelayanan perizinan. Jika memang persyaratan sudah sesuai dan lengkap, sebaiknya izin segera di terbitkan. "Kita harus memberikan pelayanan publik yang maksimal, agar citra Pemkot sebagai *good government* juga bisa tercapai," paparnya. (tea)

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



UBAH MINDSET - Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono saat mengisi diskusi Perbaikan Pelayanan Melalui Perubahan Mindset dalam Penyelenggaraan Pelayanan. IP meminta masyarakat mengubah *mindset* soal perkembangan hotel di Kota Gudeg. DOK.HUMAS PEMKOT

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005